



Efektivitas Program Taman Maju Bersama dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta

Dita Rahmaditiani Junaidi^{1*}, Rahmat Salam²

¹⁻²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: enditarahma28@gmail.com¹, rahmat.salam@umj.ac.id²

Korespondensi penulis: enditarahma28@gmail.com*

Abstract. *Green Open Space (RTH) has an important role in creating a healthy urban environment and improving the welfare of the community. In DKI Jakarta, as the capital city of Indonesia which is densely populated and experiencing rapid urbanization, the management of green open space is becoming increasingly important. This study aims to determine and analyze the effectiveness of the Taman Maju Bersama program in managing green open space in South Jakarta and East Jakarta. The type of research that will be carried out in this study is qualitative research using the type of case study research. For data collection techniques in researching the effectiveness of the Taman Maju Bersama program in managing green open space in the South Jakarta and East Jakarta Regions, namely using observation, interviews and documentation. The results showed that the green space management program was effective in achieving several individual goals, such as increasing green area and community participation. However, there are significant challenges related to budget constraints, policy changes, and coordination among stakeholders that affect the overall effectiveness of the program. Although community satisfaction was relatively positive, especially with regard to the presence of green open spaces, there is a need to improve project management, community participation, and resource utilization. The evaluation shows that the program has not been fully effective in achieving its overarching objectives, indicating the need for strategy adjustments and continuous improvement. Suggestions for improving effectiveness include improved project management, increased community participation, and optimized use of resources. This research provides important insights into the effectiveness of the RTH management program and suggests measures to improve program outcomes in the future.*

Keywords: *Effectiveness, Green Open Space, Management, Taman Maju Bersama Program.*

Abstrak. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di DKI Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia yang padat penduduk dan mengalami urbanisasi yang cepat, pengelolaan RTH menjadi semakin penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program Taman Maju Bersama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian efektivitas program Taman Maju Bersama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengelolaan RTH efektif dalam mencapai beberapa sasaran individu, seperti peningkatan luas area hijau dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat tantangan signifikan terkait keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, serta koordinasi antar stakeholder yang mempengaruhi efektivitas keseluruhan program. Meskipun kepuasan masyarakat relatif positif, terutama terkait dengan keberadaan ruang terbuka hijau, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan manajemen proyek, partisipasi masyarakat, dan penggunaan sumber daya. Evaluasi menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya efektif dalam pencapaian tujuan menyeluruh, mengindikasikan perlunya penyesuaian strategi dan perbaikan berkelanjutan. Saran untuk meningkatkan efektivitas meliputi perbaikan manajemen proyek, peningkatan partisipasi masyarakat, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai efektivitas program pengelolaan RTH dan menyarankan langkah-langkah untuk meningkatkan hasil program di masa depan.

Kata kunci: Efektivitas, Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan, Program Taman Maju Bersama.

1. LATAR BELAKANG

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Menurut Permen ATRKBPB 14 tahun 2022 tentang RTH merupakan terobosan penyediaan Ruang Terbuka Hijau karena Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di DKI Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia yang padat penduduk dan mengalami urbanisasi yang cepat, pengelolaan RTH menjadi semakin penting. Salah satu program yang telah diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan RTH di DKI Jakarta adalah Program Taman Maju Bersama.

Program Taman Maju Bersama merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan RTH di kota ini. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta. Program Taman Maju Bersama bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan RTH, meningkatkan kebersihan dan keindahan, serta memberikan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan yang dicanangkan pada Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Taman Pasal 12 (1) Prinsip rancangan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memiliki arti: a. keharmonisan antara komponen di dalam Taman meliputi: 1. perlindungan dan pelestarian kekayaan keanekaragaman hayati; 2. perlindungan tata air sebagai area resapan air; 3. pendukung ameliorasi iklim mikro; 4. peningkatan kualitas udara sebagai area penyerap polutan; dan b. keharmonisan antara Taman dengan kawasan sekitar dan sistem jaringan RTH.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta mencakup sekitar 9,98% dari total luas wilayah, atau sekitar 6.071 hektar. Dalam upaya untuk meningkatkan RTH, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi program Taman Maju Bersama (TMB), yang bertujuan untuk menyediakan ruang publik yang ramah lingkungan dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hingga saat ini, terdapat sekitar 240 TMB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Pembagian TMB per wilayah adalah sebagai berikut: Jakarta Pusat memiliki 33 TMB, Jakarta Utara 36 TMB, Jakarta Barat 47 TMB, Jakarta Selatan 60 TMB, dan Jakarta Timur 64 TMB. Pemakaman, meskipun dianggap sebagai bagian dari RTH secara

umum, tidak termasuk dalam kategori RTH Taman Maju Bersama, karena TMB difokuskan pada ruang publik yang dapat digunakan untuk kegiatan rekreasi dan sosial.

Salah satu target yang terdapat dalam dokumen RPJMD adalah penambahan rasio RTH, yang ditetapkan dalam persentase dan luasan hektar (Ha).

Tabel 1. Penambahan Rasio RTH

Indikator	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penambahan rasio RTH (dalam persen)	0.0351%	0.0346%	0.0351%	0.0212%	0.0351%	0
(dalam Ha)	23 Ha	22.64 Ha	23 Ha	13.88 Ha	23 Ha	0

Sumber : RPJMD Jakarta, 2022

Data realisasi penambahan rasio RTH di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan capaian yang belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun terdapat peningkatan luasan RTH, namun peningkatan tersebut masih di bawah target yang diharapkan. Dalam pencapaian target penambahan rasio RTH, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pengadaan lahan RTH. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan alternatif penambahan lahan RTH melalui serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) dari Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD). Namun, meskipun terdapat upaya-upaya tersebut, terdapat kekurangan luasan RTH yang perlu dicapai pada tahun yang berjalan. Terdapat kebutuhan tambahan lahan sebesar 0,04% atau 30,19 Ha yang harus dicapai pada tahun tersebut. Anggaran yang tersedia untuk pengadaan lahan di tahun tersebut juga terbatas, sehingga hanya dapat mencapai luasan sekitar 5 Ha dengan anggaran yang ada. Proses pengadaan lahan juga masih dalam tahap verifikasi kelengkapan berkas untuk persiapan musyawarah harga dan pembayaran.

Selain itu salah satu permasalahan yang terkait dengan pembangunan Taman Maju Bersama adalah penambahan jumlah lokasi yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Meskipun terdapat target pembangunan sebanyak 86 lokasi dalam kurun waktu 5 tahun, realisasi pembangunan hingga Agustus 2022 hanya mencapai 73 lokasi. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam mencapai peningkatan jumlah RTH yang diinginkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Penambahan Jumlah Lokasi TMB

Indikator	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Taman Maju Bersama	20	0	20	12	20	4

Sumber : RPJMD Jakarta, 2022

Berdasarkan tabel 2, meskipun terdapat progres dalam pembangunan Taman Maju Bersama di tahun 2022, dengan beberapa lokasi yang sudah selesai dan mencapai progres pembangunan yang tinggi, masih terdapat sejumlah lokasi yang belum selesai. Hal ini menunjukkan adanya kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat mempengaruhi pencapaian target peningkatan jumlah RTH. Dalam konteks ini, permasalahan terkait RTH mencakup keterbatasan anggaran, tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, serta pentingnya pengembangan dan pemeliharaan RTH secara menyeluruh. Semua ini perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan pembangunan Taman Maju Bersama dan pengelolaan RTH secara efektif untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, hal tersebut dikarenakan wilayah tersebut memiliki jumlah TMB terbanyak dibandingkan wilayah lainnya di DKI Jakarta. Adapun data jumlah TMB per wilayah yaitu:

Tabel 3. Data Jumlah TMB di DKI Jakarta

No.	Wilayah	Jumlah TMB
1	Jakarta Pusat	33 TMB
2	Jakarta Timur	64 TMB
3	Jakarta Selatan	60 TMB
4	Jakarta Utara	36 TMB
5	Jakarta Barat	47 TMB

Sumber : RPJMD Jakarta, 2022

Berdasarkan data, jumlah TMB di Jakarta Timur mencapai 64 taman dan Jakarta Selatan mencapai 60 TMB, menjadikannya wilayah dengan konsentrasi TMB tertinggi. Jakarta Barat menempati urutan ketiga dengan 47 TMB, diikuti oleh Jakarta Utara memiliki 36 TMB dan Jakarta Pusat dengan 33 TMB. Data ini menunjukkan bahwa Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena memiliki jumlah TMB yang paling banyak, sehingga relevan untuk dievaluasi efektivitas pengelolaan ruang terbuka hijau.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan (Mahmudi, 2019: 86). Efektivitas program TMB dapat dinilai dari peningkatan jumlah taman dan RTH di DKI Jakarta. Dengan adanya program ini, diharapkan terdapat penambahan luas lahan yang dijadikan RTH, baik melalui pembangunan taman baru maupun revitalisasi taman yang sudah ada. Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan target penambahan RTH yang telah ditetapkan dalam program dengan realisasi yang telah tercapai.

Efektivitas program Taman Maju Bersama (TMB) dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta mengalami pasang-surut. Di satu sisi, dengan semakin berkembangnya pembangunan di kota ini, kebutuhan akan RTH semakin meningkat. Namun, di sisi lain, implementasi program TMB tidak selalu mencapai hasil yang diharapkan dalam menjaga dan mengembangkan RTH. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas program TMB guna memahami tantangan yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat dalam pengelolaan RTH di DKI Jakarta.

Dalam mengevaluasi keefektifan Program Taman Maju Bersama, perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Maka judul dalam penelitian ini yaitu “Efektivitas Program Taman Maju Bersama dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta”.

2. KAJIAN TEORITIS

Ilmu Administrasi Publik

Menurut Henry (2008:8) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Sedangkan menurut Chandler dan Plano (2008:3), administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Syafiie (2012:21), administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Pengertian lain menurut Pasolong (2007:8), administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Dari uraian diatas terkait definisi administrasi publik, maka dapat peneliti interpretasikan bahwa administrasi publik merupakan kombinasi kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, serta mendorong kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan sosial. Ini adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Tujuan administrasi publik adalah untuk melaksanakan pekerjaan publik dengan efisiensi dan sejauh mungkin sesuai dengan keinginan rakyat. Ini melibatkan kerja

sama antara sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Dalam ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik, peneliti mengutip pernyataan dari para ahli diantaranya menurut Henry, Dimock, dan Tjokroadmidjojo. Dari pernyataan tersebut peneliti mengimpresmentasikan pernyataan para ahli mengenai ruang lingkup tentang Ilmu Administrasi Publik, sebagai bahan pemahaman peneliti mengenai ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik.

Nicholas (1995:33), memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri antara lain:

1. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktifitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia.
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antara pemerintahan dan etika birokrasi.

Dimock (1992:26), membagi empat komponen administrasi publik, yaitu:

1. Apa yang dilakukan pemerintah: pengaruh kebijakan dan tindakan-tindakan politis, dasar-dasar, wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan administratif yang bersifat ke dalam, dan rencana-rencana.
2. Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usaha-usahanya: struktur administrasi dari segi formalnya.
3. Bagaimana para Administrator mewujudkan kerja sama. Aliran dan proses administrasi dalam pelaksanaan, dengan titik berat pada pimpinan, tuntutan, koordinasi, pelimpahan wewenang, hubungan dengan bagian-bagian, pengawasan, moral, hubungan masyarakat dan sebagainya.
4. Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab: baik mengenai pengawasan dalam badan-badan eksekutif sendiri, dan yang lebih penting lagi mengenai pengawasan oleh badan-badan perwakilan rakyat, badan-badan yudikatif, dan berbagai badan lain.

Tjokroadmidjojo (1978:51), adalah seorang tokoh administrasi publik dari Amerika Serikat, berpendapat bahwa yang termasuk ke dalam lingkup administrasi negara adalah masalah “perumusan dan penentuan kebijakan”. Tetapi kemudian dinyatakan bahwa

administrasi publik bukan saja mempunyai fungsi tradisional berupa “pelaksanaan kebijakan” tetapi juga “perumusan dan penentuan serta penilaian hasil-hasil pelaksanaan berbagai kebijakan negara”. Lebih lanjut Nigro (1970:25), mengemukakan bahwa “para pejabat administrasi tidak hanya harus membuat keputusan yang lebih banyak, tetapi juga memecahkan masalah yang harus mereka atasi atau diharapkan dapat diatasi dalam mempraktikkan kebijakan mereka juga banyak mengalami kesulitan bahkan kadang-kadang begitu sulit.

Kencana Syaifiie dkk (1999:29), dalam Ilmu Administrasi Publik Menguraikan ruang lingkup administrasi publik sebagai berikut:

1. Dalam bidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan meliputi:
 - (a) Administrasi pemerintah pusat,
 - (b) Administrasi pemerintah daerah,
 - (c) Administrasi pemerintahan kecamatan,
 - (d) Administrasi pemerintahan kelurahan,
 - (e) Administrasi pemerintah desa,
 - (f) Administrasi pemerintahan kotamadya,
 - (g) Administrasi pemerintahan kota administratif,
 - (h) Administrasi departemen,
 - (i) Administrasi non departemen.
2. Dalam bidang kekuasaan, meliputi:
 - (a) Administrasi politik luar negeri,
 - (b) Administrasi politik dalam negeri,
 - (c) Administrasi partai politik,
 - (d) Administrasi kebijakan pemerintah.
3. Dalam bidang peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - (a) landasan Idill,
 - (b) Landasan operasional.
4. Dalam bidang kenegaraan, meliputi:
 - (a) Tugas dan kewajiban negara,
 - (b) Hak dan kewenangan negara,
 - (c) Tipe dan bentuk negara,
 - (d) Fungsi dan prinsip negara,
 - (e) Unsur-unsur negara,
 - (f) Tujuan negara,
 - (g) Tujuan nasional.

5. Dalam pemikiran hakiki, meliputi:
 - (a) Etika administrasi publik,
 - (b) Estetika administrasi publik,
 - (c) Logika administrasi publik,
 - (d) Hakekat administrasi publik.
6. Dalam bidang ketatalaksanaan, meliputi:
 - (a) Administrasi pembangunan.
 - (b) Administrasi perkantoran,
 - (c) Administrasi kepegawaian,
 - (d) Administrasi kemeliteran,
 - (e) Administrasi kepolisian,
 - (f) Administrasi perpajakan,
 - (g) Administrasi pengadilan,
 - (h) Administrasi perusahaan, mencakup antara lain:
 - (i) Administrasi penjualan,
 - (ii) Administrasi periklanan,
 - (iii) Administrasi pemasaran,
 - (iv) Administrasi nistrasi perbankan,
 - (v) Administrasi perhotelan,
 - (vi) Administrasi pengangkutan.

Pelayanan Publik

Istilah pelayanan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “layan” yang berarti menolong menyediakan segala apa saja yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Sedangkan dalam bahasa Inggris pelayanan diartikan “service”. Pelayanan merupakan salah upaya pemuasan baik yang dilakukan pemerintah, swasta, maupun perorangan kepada masyarakat atau pelanggan. Pelayanan pada dasarnya adalah interaksi antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan sehingga bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas pemberi pelayanan.

Hardiyansyah (2011:11) mengatakan bahwa “pelayanan diartikan sebagai bentuk aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. Sedangkan definisi yang diberikan Moenir (2002:26-27) adalah “pelayanan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat

dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam garapan pengguna”.

Definisi pelayanan publik pada dasarnya berbicara mengenai pelayanan tidak terlepas dari kepentingan umum atau kepentingan publik, maka dari itu sering kita dengar istilah pelayanan publik (*public service*). Pelayanan publik merupakan suatu perwujudan tugas dan kewajiban negara dalam hal memberikan pelayanan bagi warganya. Pelayanan publik dalam perkembangan lebih lanjut dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan maupun organisasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan definisi yaitu: Pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik menurut Moenir (2002:7) menyebutnya sebagai “pelayanan umum yakni suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Selain itu, Batinggi (1998:12) mengatakan bahwa “pelayanan publik diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum”. Sehingga demikian kewajiban pemerintah memberikan pelayanan publik adalah hak setiap warga negara.

Pelayanan publik merupakan usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk barang maupun jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Melengkapi uraian tersebut Nurcholis (2005:175-176) mengemukakan “Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat”. Pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik harus diselenggarakan secara efektif dan efisien guna melindungi hak asasi manusia, memperkuat demokrasi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa Pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari pelayanan publik adalah melindungi hak asasi manusia, memperkuat demokrasi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintah harus melaksanakan pelayanan publik secara efektif dan efisien untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam serangkaian kegiatan pelayanan publik terdapat unsur yang akan mendukung jalannya pelayanan publik menurut Moenir, (1995:8), meliputi:

1. Perlu adanya sistem informasi, prosedur, dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
2. Personil Terutama ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.
3. Sarana dan Prasarana Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai dan lain-lain.
4. Masyarakat sebagai pelanggan Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kualitas pelayanan publik, sehingga diperlukan asas-asas pelayanan publik sebagai dasar pelayanannya. Definisi dari asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman penilaian kinerja bagi setiap lembaga penyelenggara pelayanan publik. Sinambela (2008:6) mengemukakan asas-asas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat (Rahmayanty,

2010:86). Sedangkan Ibrahim (2008:19) menjelaskan hakikat pelayanan publik atau pelayanan umum adalah:

1. Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi (lembaga) pemerintah/pemerintahan di bidang pelayanan umum.
2. Mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan sistem dan tata laksana pelaksanaan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pelayanan prima kepada masyarakat sebagai suatu kewajiban. Dalam hal ini, penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, pengawasan, tingkat kepuasan masyarakat, dan evaluasi kinerja pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik yang prima kepada masyarakat merupakan perwujudan aparatur pemerintah sebagai pelayan dan abdi masyarakat.

Ruang Terbuka Hijau

Menurut Permen ATRKBPN 14 tahun 2022 tentang RTH merupakan terobosan penyediaan Ruang Terbuka Hijau karena Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Berdasarkan mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon (nett zero emission) maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas. Penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi ekologis; resapan air; ekonomi; sosial budaya; estetika; dan penanggulangan bencana. Fungsi ekologis meliputi penghasil oksigen; bagian paru-paru kota; pengatur iklim mikro; peneduh; penyerap air hujan; penyedia habitat vegetasi dan satwa; penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah; penahan angin; dan/atau peredam kebisingan. RTH berupa kawasan/zona RTH terdiri atas rimba kota; taman kota; taman kecamatan; taman kelurahan; taman rukun warga (RW); taman rukun tetangga (RT); pemakaman; dan/atau jalur hijau.

Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempertimbangkan berbagai aspek fungsi. Aspek fungsi yang perlu dipertimbangkan meliputi aspek ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. Fungsi ekologis dari RTH meliputi beberapa hal, seperti penghasil oksigen, sebagai bagian paru-paru kota, pengatur iklim

mikro, peneduh, penyerap air hujan, penyedia habitat vegetasi dan satwa, penyerap dan penjernihan polusi udara, polusi air, dan polusi tanah, penahan angin, serta peredam kebisingan.

Selain itu, RTH juga memiliki fungsi resapan air yang mencakup area penyedia resapan air, area penyedia pengisian air tanah, dan pengendali banjir. RTH juga memiliki fungsi ekonomi, seperti menjadi pemberi jaminan peningkatan nilai tanah, memberikan nilai tambah pada lingkungan kota, serta menyediakan ruang produksi dalam sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan wisata alam. Fungsi sosial budaya dari RTH meliputi pemertahanan aspek historis, penyedia ruang interaksi masyarakat, ruang kegiatan rekreasi dan olahraga, ruang ekspresi budaya, ruang kreativitas dan produktivitas, ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan, serta ruang pendukung kesehatan. RTH juga memiliki fungsi estetika yang meningkatkan kenyamanan lingkungan, keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan, membentuk identitas elemen kota, serta menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Terakhir, RTH juga memiliki fungsi dalam penanggulangan bencana, seperti pengurangan risiko bencana, menyediakan ruang evakuasi bencana, dan ruang pemulihan pascabencana.

Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Pasolong (2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari *variable* lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagi penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Menurut Tika P. (2008:129) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendapat lain menurut Kurniawan (2005:106) menekankan pentingnya efektivitas dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Menurut Ratminto dan Winarsi (2005:179) efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan dengan baik dalam bentuk target atau sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Sedangkan Mutiarin (2014: 95) mendefinisikan efektivitas berasal dari kata kerja efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. Efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Selain itu, menurut Wojowisoto (1980: 97) kata “efektif berarti berhasil, tepat dan manjur”.

Menurut Gibson, dkk (1990: 25), Keefektifan merupakan penilaian yang kita buat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan, makin lebih efektif kita menilai mereka. Sementara, Menurut Mahmudi (2019: 86) Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. menurut pendapat ahli lain Komaruddin (2019:96) mengatakan efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Sementara menurut Sutrisno, (2010: 133), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan atau kesuksesan dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Efektivitas memiliki hubungan sebab-akibat yang mengindikasikan bahwa tercapainya tujuan terkait dengan proses kegiatan yang dilakukan. Perbedaan antara efektivitas dan efisiensi terletak pada arti dan penggunaannya. Efisiensi melibatkan perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan. Efektivitas juga merupakan salah satu dimensi produktivitas yang mengarah pada pencapaian unjuk kerja maksimal, termasuk kualitas, kuantitas, dan waktu. Berbagai definisi dan pendapat ahli menyatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta

sebagai kunci kesuksesan suatu organisasi. Efektivitas juga dapat dihubungkan dengan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik dalam bentuk target atau sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Lebih jauh lagi, efektivitas melibatkan melakukan pekerjaan dengan benar, sesuai, dan dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Mutiarin (2014: 96-97), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan program, mengacu pada sejauh mana program secara keseluruhan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan program dapat diukur dengan mengamati hasil akhir dari program dan membandingkannya dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.
2. Keberhasilan sasaran, sasaran adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh program. Pengukuran keberhasilan sasaran menilai sejauh mana tujuan-tujuan tersebut tercapai. Pencapaian sasaran merupakan bagian penting dari pengukuran efektivitas keseluruhan program.
3. Kepuasan terhadap program, kepuasan terhadap program mengacu pada pandangan dan penilaian peserta atau penerima manfaat terhadap program. Evaluasi ini berfokus pada sejauh mana orang-orang yang terlibat dalam program merasa puas dengan layanan, fasilitas, atau bantuan yang diberikan oleh program tersebut. Ukuran kepuasan dapat bervariasi, seperti skala penilaian atau survei kepuasan. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa program telah menyediakan solusi atau manfaat yang diharapkan oleh peserta atau penerima manfaat, yang dapat menunjukkan tingkat efektivitas program dalam memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.
4. Tingkat *input* dan *output*, pengukuran tingkat *input* dan *output* mencakup analisis terhadap sumber daya yang digunakan (*input*) dan hasil yang dihasilkan (*output*) oleh program. *Input* bisa berupa anggaran, tenaga kerja, waktu, atau sumber daya lain yang diinvestasikan dalam program. *Output* adalah hasil konkret yang dihasilkan dari program, seperti produk, layanan, atau aktivitas yang telah dilakukan. Pengukuran efektivitas pada aspek ini melihat sejauh mana input yang digunakan mencapai *output* yang diinginkan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa program beroperasi secara efisien dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan investasi yang diberikan.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh, pengukuran efektivitas juga dapat melibatkan penilaian terhadap keseluruhan pencapaian tujuan dari program, bukan hanya sebatas sasaran-sasaran individu. Ini membantu dalam mengevaluasi dampak keseluruhan program terhadap masalah atau situasi yang ingin diatasi.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

O'Reilly (2003:27) mengemukakan bahwa ada beberapa pendekatan untuk mengukur kinerja efektifitas:

1. Pendekatan objektif yang berfokus pada kegiatan yang mengukur keberhasilan atau pencapaian hasil kegiatan sesuai dengan rencana.
2. Pendekatan sumber adalah untuk mengukur keabsahan suatu transaksi. Pendekatan ini memprioritaskan keberhasilan organisasi dalam memperoleh sumber daya yang memenuhi kebutuhan baik fisik maupun tidak berwujud, atau kebutuhan organisasi.
3. Pendekatan proses adalah untuk menentukan efektivitas pelayanan semua kegiatan proses internal organisasi atau mekanisme kerja.
4. Pendekatan terpadu merupakan kombinasi pendekatan dengan pendekatan lain yang mencakup semua kegiatan proses.

Menurut pendapat Danim (2012:119), hasil pengukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dipublikasikan, yaitu hasil ini adalah jumlah atau derajat relevansi suatu organisasi, program, atau kegiatan. Hasilnya dapat dipastikan dengan membandingkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*).
2. Kepuasan yang diperoleh. Artinya, ukuran kinerja efektifitas ini bisa bersifat kuantitatif (berdasarkan kuantitas atau kuantitas) dan kualitatif (berdasarkan kualitas).
3. Hasil layanan inovatif. Artinya membangun hubungan yang produktif dengan dunia kerja, yang dapat menumbuhkan kreativitas dan keterampilan.
4. Berkelanjutan berarti memiliki kata yang diangkat ke intensitas dan termasuk dalam berita besar.

Efektivitas suatu organisasi sangat tergantung pada kinerja orang-orang yang bekerja di dalamnya. Banyak kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja efektifitas layanan. Menurut Siagian, (1996:60) yaitu:

1. Faktor waktu yaitu Ketepatan layanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Penggunaan ukuran kecepatan di mana layanan disediakan hanya bervariasi dari orang ke orang. Selain penilaian subjektif ini, jelas bahwa istilah waktu dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pekerjaan.
2. Faktor akurasi yang dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja layanan jasa. Unsur akurasi disini adalah faktor akurasi saat melayani masyarakat. Pada hakikatnya masyarakat cenderung menawarkan nilai yang sederhana kepada penyedia layanan jika ada banyak kesalahan dalam proses layanan, bahkan jika itu disampaikan dalam waktu singkat.
3. Faktor gaya pemberian layanan adalah ukuran lain yang sering digunakan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja layanan. Arti gaya di sini adalah cara dan kebiasaan penyedia layanan melayani masyarakat.

Mutiarin (2014: 98) menyimpulkan kriteria efektivitas suatu kegiatan ke dalam tiga indikator yang didasarkan pada jangka waktu, yaitu:

1. Efektivitas jangka pendek, meliputi: produksi (*production*), efisiensi (*efficiency*), dan kepuasan (*satisfaction*).
2. Efektivitas jangka menengah, meliputi: kemampuan menyesuaikan diri (*adaptiveness*) dan mengembangkan diri (*development*).
3. Efektivitas jangka panjang; keberlangsungan (*sustainability*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Streers (1985:8) dalam bukunya menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu sebagai berikut:

1. Struktur yang dibangun dan teknologi yang digunakan dalam organisasi akan sangat berpengaruh terhadap proses dan pencapaian tujuan.
2. Organisasi sebagai organisasi yang terbuka, kelangsungan hidupnya akan sangat tergantung kepada lingkungan sekitarnya baik yang berada di dalam organisasi maupun diluar organisasi.
3. Bahwa manusia sebagai unsur penting dari organisasi memiliki kemampuan, pandangan motivasi dan budaya yang berbeda.

4. Kebijakan dan praktek manajemen yang ditetapkan oleh pimpinan dalam mengatur dan mengendalikan organisasi sangat berpengaruh bagi organisasi maupun bagi pencapaian tujuan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, sebagaimana didefinisikan oleh Creswell (2017), yang bertujuan mengeksplorasi secara mendalam makna dari suatu fenomena sosial. Studi ini difokuskan pada efektivitas Program Taman Maju Bersama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Melalui studi kasus, peneliti dapat memahami secara rinci proses, aktivitas, dan peran para pihak yang terlibat dalam program tersebut, serta bagaimana program ini diimplementasikan dalam konteks sosial yang spesifik.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*, yang memungkinkan peneliti menjangkau narasumber relevan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Sumber data utama berasal dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta serta masyarakat yang terlibat langsung atau terdampak oleh program. Total terdapat enam informan, termasuk pejabat pemerintah dan warga setempat yang memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka terhadap efektivitas program dalam mengelola RTH. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik coding untuk mengidentifikasi tema-tema penting, kemudian disajikan dalam bentuk naratif. Validitas data dijaga melalui berbagai strategi seperti triangulasi sumber, member checking, deskripsi yang kaya, serta refleksi atas potensi bias peneliti. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan terpercaya tentang efektivitas program dalam konteks pengelolaan RTH di DKI Jakarta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Implementasi Program Taman Maju Bersama dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas program, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dihubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi menurut teori Streers (1985). Pertama, rekomendasi untuk perbaikan manajemen proyek dan peningkatan dalam pemantauan dan evaluasi mencerminkan dampak dari struktur yang dibangun dan teknologi yang digunakan dalam organisasi terhadap proses

dan pencapaian tujuan. Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat sebagai rekomendasi menyoroti konsep organisasi terbuka yang ditekankan oleh teori Streers. Kesuksesan program tidak hanya bergantung pada faktor internal organisasi, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk berinteraksi dan merespons lingkungan sekitarnya, khususnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ketiga, fokus pada partisipasi masyarakat dan upaya menciptakan forum dialog terbuka mencerminkan pemahaman bahwa manusia sebagai unsur penting dari organisasi memiliki kemampuan, pandangan motivasi, dan budaya yang berbeda.

Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan partisipasi harus mempertimbangkan keberagaman ini dan menciptakan ruang untuk berbagai perspektif. Keempat, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dihubungkan dengan kebijakan dan praktik manajemen yang ditetapkan oleh pimpinan. Kebijakan yang mendukung transparansi, keterlibatan, dan partisipasi masyarakat, bersama dengan praktek manajemen yang efektif, dapat membentuk dasar bagi pencapaian tujuan program. Dengan demikian, integrasi aspek-aspek ini dapat membantu meningkatkan efektivitas program dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam pelayanan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

1. Keberhasilan Program

Dalam pembahasan mengenai keberhasilan Program Taman Maju Bersama (TMB), wawancara dengan Informan 1 mengungkapkan bahwa meskipun belum ada pengukuran formal terkait *Key Performance Indicators* (KPI), program ini dianggap bermanfaat bagi masyarakat dan telah membawa perubahan positif pada lingkungan. Informan 1 menyoroti pentingnya mengukur KPI untuk secara objektif menilai dampak program terhadap lingkungan sekitar. Saat ini, fokus utama adalah pada pembangunan fisik taman, namun evaluasi mendalam tentang dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh taman tersebut masih kurang dilakukan.

Dari perspektif manajemen, hal ini menunjukkan bahwa program TMB masih berada dalam tahap awal implementasi di mana prioritas utama adalah memastikan pembangunan infrastruktur. Namun, untuk mengklaim keberhasilan secara holistik, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam menilai dampak yang dihasilkan. Pengukuran KPI yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana program ini telah berhasil mencapai tujuannya. Dengan demikian, pengembangan KPI yang lebih rinci dan spesifik diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program TMB dalam jangka panjang.

Selain itu, tanggapan dari beberapa informan lainnya juga memperkuat pandangan bahwa Program Taman Maju Bersama memiliki dampak positif yang signifikan. Informan 2, misalnya, mengaitkan keberhasilan program ini dengan visi strategis Gubernur Anies Baswedan yang ingin menjadikan ruang terbuka hijau sebagai "ruang ketiga" di mana masyarakat dapat bersosialisasi tanpa harus kembali ke rumah. Pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program ini dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan TMB tidak hanya diukur dari aspek fisik pembangunan taman, tetapi juga dari bagaimana program ini memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Namun, meskipun ada banyak dukungan dan pengakuan akan manfaat program ini, wawancara dengan Informan 5 dan 6 menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk informasi yang lebih rinci terkait capaian target RTH dan detail teknis pengelolaan program. Keterbatasan informasi ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang lebih baik dan transparansi dari pihak yang bertanggung jawab, seperti Dinas Pertamanan, diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program ini.

Secara keseluruhan, wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa Program Taman Maju Bersama telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang lebih baik. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang lebih terukur dan berkelanjutan, diperlukan pengembangan KPI yang lebih mendalam serta evaluasi yang komprehensif terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh program ini. Selain itu, komunikasi yang lebih efektif dan transparan antara pemerintah dan masyarakat akan semakin memperkuat implementasi program ini di masa mendatang.

Dalam kaitannya dengan teori Mutiarin (2014: 96-97), keberhasilan Program Taman Maju Bersama (TMB) dapat dianalisis melalui perspektif efektivitas program yang menekankan pada sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mutiarin menyatakan bahwa pengukuran efektivitas yang paling menonjol adalah keberhasilan program, yang diukur dengan membandingkan hasil akhir dengan tujuan awal.

Pada kasus TMB, meskipun belum ada pengukuran formal terkait *Key Performance Indicators* (KPI), wawancara menunjukkan bahwa program ini dianggap telah membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, meskipun evaluasi terhadap dampak sosial dan lingkungan masih kurang. Ini menunjukkan bahwa sementara TMB mungkin berhasil dalam aspek pembangunan fisik, belum ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa

program ini telah mencapai semua tujuan yang lebih luas, seperti dampak sosial dan ekologis yang diinginkan.

Dalam konteks teori Mutiarin, keberhasilan TMB dapat lebih terukur jika KPI yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis diterapkan, sehingga hasil akhirnya dapat dievaluasi dan dibandingkan dengan tujuan awal. Pendekatan yang lebih sistematis ini akan memungkinkan pemerintah untuk menilai sejauh mana TMB telah mencapai efektivitas program secara keseluruhan, sesuai dengan definisi keberhasilan yang diberikan oleh Mutiarin.

Selain itu, pentingnya keterlibatan masyarakat dan komunikasi yang lebih transparan, seperti yang ditekankan oleh informan, juga mendukung pandangan Mutiarin bahwa keberhasilan program harus mencerminkan pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam hal ini, pengembangan KPI yang mendalam dan komunikasi yang lebih baik dapat meningkatkan efektivitas program dalam jangka panjang, sejalan dengan kerangka teori Mutiarin.

2. Keberhasilan Sasaran

Dalam mengevaluasi keberhasilan sasaran Program Taman Maju Bersama (TMB), wawancara dengan berbagai informan memberikan gambaran yang beragam namun saling melengkapi. Informan 3 dan 4 sepakat bahwa pencapaian sasaran program dapat dinilai melalui tiga indikator utama: progres fisik pembangunan taman, partisipasi masyarakat dalam penggunaan taman, dan survei dampak sosial ekonomi. Ketiga indikator ini mencerminkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menekankan pada aspek fisik tetapi juga melibatkan aspek sosial dan ekonomi, yang menunjukkan adanya upaya untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Informan 2 menyoroti bahwa jumlah pengunjung menjadi salah satu parameter kunci untuk mengukur keberhasilan taman. Kehadiran banyak pengunjung dianggap sebagai bukti bahwa taman tersebut diminati oleh masyarakat. Informan 2 juga mencatat bahwa taman dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, baik komersial maupun non-komersial, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya taman sebagai ruang publik yang multifungsi, yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, keberagaman aktivitas yang dilakukan di taman menjadi indikator tambahan dari kesuksesan taman, karena menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas taman terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, wawancara dengan Informan 5 mengungkapkan pandangan yang sedikit berbeda. Informan ini menyoroti adanya ketidakpastian terkait peran taman dalam mengurangi polusi, mengindikasikan bahwa aspek ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Meskipun demikian, Informan 5 menekankan bahwa daya tarik masyarakat terhadap taman, dalam hal jumlah pengunjung, menjadi fokus utama dalam menilai keberhasilan taman. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada aspek lingkungan yang relevan, popularitas taman di mata masyarakat masih menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilannya.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan sasaran Program TMB dapat dievaluasi dari berbagai sudut pandang. Di satu sisi, pencapaian fisik dan partisipasi masyarakat menjadi indikator utama yang diakui oleh sebagian besar informan. Di sisi lain, aspek keberagaman kegiatan dan daya tarik masyarakat terhadap taman juga penting untuk dipertimbangkan. Meskipun aspek lingkungan seperti pengurangan polusi belum menjadi fokus utama dalam penilaian ini, penting untuk diakui bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak lingkungan dari taman tersebut. Dengan demikian, untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik tentang keberhasilan sasaran program, perlu adanya kombinasi antara indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencakup semua aspek penting, termasuk fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam mengevaluasi keberhasilan sasaran Program Taman Maju Bersama (TMB), wawancara dengan beberapa informan memberikan pandangan yang beragam mengenai metode dan indikator yang digunakan. Informan 2 menekankan pentingnya jumlah pengunjung sebagai indikator utama untuk menilai apakah taman diminati oleh masyarakat. Sementara itu, Informan 3 dan 4 menambahkan bahwa luas area taman baru, tingkat partisipasi masyarakat, dan survei kepuasan pengguna juga menjadi parameter penting dalam mengukur keberhasilan program.

Pendekatan yang dikemukakan oleh para informan ini sejalan dengan teori Mutiarin (2014: 96-97), yang menyatakan bahwa keberhasilan sasaran adalah penilaian sejauh mana tujuan-tujuan spesifik dari program tercapai. Dalam konteks TMB, tujuan spesifik ini dapat berupa peningkatan jumlah ruang terbuka hijau, partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan taman, serta kepuasan pengguna terhadap fasilitas yang disediakan. Keberhasilan sasaran ini merupakan bagian integral dari pengukuran efektivitas keseluruhan program, karena pencapaian tujuan spesifik mencerminkan sejauh mana program berhasil memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Namun, wawancara juga mengungkapkan bahwa ada keterbatasan dalam pemahaman mengenai dampak lingkungan dari taman, seperti pengurangan polusi, yang menurut Informan 5 memerlukan penelitian lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa indikator keberhasilan dapat diukur secara langsung, seperti jumlah pengunjung dan luas area, aspek lain yang lebih kompleks, seperti dampak lingkungan, mungkin memerlukan pendekatan evaluasi yang lebih mendalam.

Dengan demikian, keberhasilan sasaran dalam Program TMB dapat dinilai melalui kombinasi indikator kuantitatif dan kualitatif, yang mencakup pemantauan fisik, partisipasi masyarakat, serta survei kepuasan pengguna. Evaluasi yang lebih komprehensif, termasuk penelitian terhadap dampak lingkungan, akan semakin memperkuat penilaian efektivitas program secara keseluruhan, sesuai dengan pandangan Mutiarin bahwa pencapaian sasaran merupakan komponen krusial dalam pengukuran efektivitas program.

3. Kepuasan terhadap Program

Dalam analisis tingkat kepuasan terhadap Program Taman Maju Bersama (TMB), wawancara dengan beberapa informan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat dan mekanisme evaluasi yang digunakan untuk mengukur kepuasan tersebut.

Informan 3 dan 4 mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan dapat diukur melalui survei langsung kepada masyarakat serta melalui observasi terhadap interaksi dan aktivitas masyarakat di Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh program. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya evaluasi berbasis data lapangan yang memungkinkan pemerintah memahami pengalaman pengguna secara langsung.

Hasil wawancara dengan Informan 5 dan 6 memberikan pandangan yang lebih rinci mengenai kepuasan masyarakat. Informan 5 menyatakan kepuasan yang sangat tinggi terhadap program, mencerminkan bahwa taman-taman yang dibangun benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Sebaliknya, Informan 6 menekankan pada keberhasilan program dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan taman, yang menurutnya menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan warga sekitar.

Pernyataan Informan 2 tentang mekanisme pengaduan dan evaluasi yang dilakukan melalui CRM (*Customer Relationship Management*) juga menunjukkan upaya proaktif pemerintah dalam mengakomodasi masukan dan keluhan masyarakat. Sistem pengaduan ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kerusakan atau masalah lain yang mungkin terjadi di taman, serta memberikan ruang bagi warga untuk menilai aktivitas yang berlangsung di taman tersebut. Evaluasi yang dilakukan secara partisipatif ini tidak hanya meningkatkan

kualitas layanan yang diberikan, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan di antara masyarakat terhadap fasilitas yang ada.

Dari wawancara dengan Informan 3 dan 4, juga terlihat bahwa umpan balik dari masyarakat dianggap sebagai indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilan program. Umpan balik ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga program dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi Masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program Taman Maju Bersama sangat tinggi, terutama karena program ini dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, mekanisme pengaduan dan evaluasi yang ada semakin memperkuat keberhasilan program, karena memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengawasan dan pengembangan taman. Ini sejalan dengan teori Mutiarin (2014) tentang pentingnya pencapaian sasaran spesifik sebagai bagian dari pengukuran efektivitas program secara keseluruhan. Dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah, serta mekanisme evaluasi yang solid, Program TMB menunjukkan efektivitasnya dalam menciptakan ruang terbuka yang bermanfaat bagi warga Jakarta.

Dalam konteks Program Taman Maju Bersama (TMB), kepuasan masyarakat merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas program tersebut. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mutiarin (2014: 96-97), kepuasan terhadap program adalah salah satu ukuran utama efektivitas, di mana evaluasi ini berfokus pada sejauh mana penerima manfaat merasa puas dengan layanan, fasilitas, atau bantuan yang diberikan.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa masyarakat merasa sangat puas dengan fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh Program TMB. Informan 5, misalnya, mengungkapkan kepuasan yang sangat tinggi terhadap taman yang dikelola oleh program, menyatakan bahwa taman tersebut sangat mendukung kebutuhan masyarakat dan memberikan pengalaman yang positif. Begitu juga dengan Informan 6, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan taman, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan warga.

Sesuai dengan teori Mutiarin, tingkat kepuasan yang tinggi ini mencerminkan bahwa Program TMB telah berhasil memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, yang menjadi indikator penting dari efektivitas program. Survei dan observasi yang digunakan untuk mengukur kepuasan juga sesuai dengan pendekatan yang disarankan oleh Mutiarin, di mana ukuran kepuasan dapat bervariasi tergantung pada metode evaluasi yang digunakan. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa Program TMB tidak hanya efektif dalam

menyediakan fasilitas publik, tetapi juga dalam melibatkan masyarakat dan menjawab kebutuhan spesifik mereka.

Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap Program TMB dapat dianggap sebagai bukti efektivitas program ini, sesuai dengan kriteria yang dikemukakan oleh Mutiarin. Program ini tidak hanya berhasil dalam mencapai sasaran fisiknya, yaitu pembangunan taman, tetapi juga dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat yang menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut telah berhasil menyediakan solusi dan manfaat yang diharapkan, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

4. Tingkat input dan output

Pembahasan mengenai tingkat input dan output dalam Program Taman Maju Bersama (TMB) menunjukkan bahwa data yang tersedia dan digunakan untuk mengukur keberhasilan program mencakup berbagai format dan indikator. Informan 2 menyebutkan bahwa dokumentasi visual seperti foto-foto kegiatan dan hasil monitoring serta evaluasi (monev) merupakan bentuk data yang mencerminkan output program. Hal ini menunjukkan bahwa dokumentasi visual digunakan sebagai salah satu alat untuk merefleksikan capaian program, memberikan bukti konkret atas implementasi yang telah dilakukan.

Selanjutnya, Informan 3 dan 4 menambahkan bahwa data output juga dapat dilihat dari jumlah taman baru yang dibangun, luas area hijau yang dikelola, serta jumlah kunjungan masyarakat ke taman-taman tersebut. Indikator-indikator ini penting karena memberikan gambaran kuantitatif mengenai perkembangan program dalam meningkatkan jumlah dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang merupakan tujuan strategis dari program ini. Jumlah taman baru dan peningkatan luas area hijau mencerminkan keberhasilan dalam memperluas fasilitas publik, sementara jumlah kunjungan masyarakat mencerminkan sejauh mana fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat.

Keberhasilan program TMB, seperti yang dijelaskan oleh Informan 2, diukur dari tingkat pemanfaatan fasilitas yang dibangun. Pandangan ini didukung oleh Informan 3 dan 4 yang menyatakan bahwa keberhasilan program secara menyeluruh dapat dilihat dari pencapaian tujuan strategis, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas RTH. Namun, mereka juga menekankan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk memahami sejauh mana pencapaian tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta lingkungan sekitar.

Analisis ini menunjukkan bahwa pengukuran keberhasilan program TMB tidak hanya didasarkan pada output fisik seperti jumlah taman atau luas area hijau, tetapi juga pada dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu tingkat pemanfaatan dan kepuasan masyarakat terhadap fasilitas yang disediakan. Dengan demikian, efektivitas program ini dapat diukur melalui kombinasi data kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan output serta dampak sosial dari program tersebut.

Menurut Mutiarin (2014: 96-97), yang menyatakan bahwa pengukuran efektivitas mencakup analisis terhadap sumber daya yang digunakan (input) dan hasil yang dihasilkan (output) oleh program. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa program TMB telah menggunakan berbagai sumber daya, seperti anggaran, tenaga kerja, waktu, dan upaya monitoring serta evaluasi, yang direfleksikan melalui dokumentasi visual seperti foto kegiatan dan data hasil monev.

Output dari program ini, sebagaimana diungkapkan oleh Informan 3 dan 4, mencakup hasil konkret seperti jumlah taman baru yang dibangun, luas area hijau yang dikelola, serta jumlah kunjungan masyarakat. Ini sejalan dengan teori Mutiarin yang menekankan bahwa output adalah hasil nyata yang dihasilkan dari investasi input program. Dengan demikian, program ini dapat dinilai efektif jika sumber daya yang digunakan (input) telah menghasilkan output yang diinginkan, yaitu peningkatan jumlah RTH dan pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat.

Efektivitas program TMB, dalam konteks ini, dapat diukur melalui sejauh mana input seperti anggaran dan tenaga kerja berhasil menciptakan taman-taman baru dan meningkatkan kualitas RTH, serta seberapa besar masyarakat memanfaatkan hasil dari program ini. Analisis ini mendukung pandangan Mutiarin bahwa pengukuran efektivitas harus mempertimbangkan keseimbangan antara input yang diinvestasikan dan output yang dihasilkan, memastikan bahwa program beroperasi dengan efisien dan mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan demikian, program TMB yang mampu menghasilkan output signifikan dalam bentuk fasilitas publik yang dimanfaatkan masyarakat, serta dokumentasi kegiatan yang mendukung, dapat dianggap sebagai program yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip pengukuran efektivitas menurut Mutiarin.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Dalam konteks pencapaian tujuan program Taman Maju Bersama (TMB), hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan adanya berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini. Indikator-indikator tersebut mencakup luas area yang dikelola, tingkat partisipasi masyarakat, serta perubahan positif dalam kualitas

lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada hasil fisik seperti jumlah dan luas taman yang dibangun, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas. Pemahaman ini sesuai dengan teori Mutiarin (2014) yang menekankan pentingnya mengukur efektivitas melalui analisis input dan output, di mana input berupa sumber daya yang diinvestasikan dalam program, dan output berupa hasil yang diharapkan. Dengan demikian, penggunaan indikator yang beragam ini mencerminkan upaya program untuk mencapai efektivitas yang holistik, memastikan bahwa setiap input yang digunakan benar-benar menghasilkan output yang bernilai bagi masyarakat dan lingkungan.

Namun, dalam implementasi program, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti yang diungkapkan oleh Informan 1. Keterbatasan anggaran dan dampak pandemi Covid-19 menjadi hambatan utama dalam menjalankan program ini. Pandemi mengakibatkan refocusing anggaran, yang mengurangi alokasi dana untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ini sejalan dengan teori Steers yang menyatakan bahwa struktur dan teknologi dalam organisasi dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Keterbatasan anggaran dapat dilihat sebagai faktor struktural yang menghambat proses pencapaian tujuan program, sementara tantangan lain seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep taman dan kualitas tim internal menunjukkan adanya kekurangan dalam aspek teknologi atau keahlian dalam implementasi.

Selain itu, Informan 2 menyoroti bahwa perubahan kepemimpinan membawa perubahan dalam nama dan branding program, dari TMB menjadi RTH. Meskipun istilah berubah, esensi dan tujuan program tetap sama, yaitu pengembangan ruang terbuka hijau. Ini menunjukkan pentingnya kontinuitas dalam kebijakan publik, di mana perubahan dalam kepemimpinan tidak menghalangi kelanjutan program yang sudah berjalan baik. Namun, perubahan branding ini juga menyoroti tantangan dalam mempertahankan identitas program yang konsisten, yang penting untuk efektivitas jangka panjang.

Dari sudut pandang tantangan lain, aspek perizinan, partisipasi masyarakat, dan masalah teknis yang diidentifikasi oleh Informan 3 dan 4 menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya tergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak. Misalnya, keberadaan pedagang kaki lima yang diangkat oleh Informan 5 menjadi tantangan unik dalam pengelolaan taman di area perkotaan. Ini mencerminkan realitas di mana program pengembangan RTH harus bersaing dengan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda, dan perlu adanya regulasi yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lingkungan dan aktivitas ekonomi informal.

Rekomendasi yang diberikan oleh informan untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan mencakup berbagai aspek, mulai dari perbaikan manajemen proyek hingga peningkatan partisipasi masyarakat dan pemantauan yang lebih baik. Khususnya, pemilihan lokasi taman yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci yang diungkapkan oleh Informan 2 dan 5. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan taman dianggap penting untuk memastikan bahwa RTH yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Hal ini selaras dengan teori Mutiarin (2014) yang menekankan pentingnya input dari berbagai pihak untuk menghasilkan output yang efektif dan sesuai dengan tujuan program.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas program TMB dapat ditingkatkan dengan memperkuat manajemen proyek, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program melalui koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan. Dengan demikian, program ini tidak hanya dapat mencapai tujuan fisiknya, tetapi juga membawa dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Pembahasan tentang pencapaian tujuan menyeluruh dalam program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menunjukkan pentingnya penggunaan indikator yang relevan dan komprehensif untuk mengukur efektivitas program. Berdasarkan wawancara dengan para informan, beberapa indikator yang digunakan meliputi luas area yang dikelola, tingkat partisipasi masyarakat, serta perubahan positif dalam kualitas lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Mutiarin (2014: 96-97), di mana pengukuran efektivitas program tidak hanya mencakup pencapaian sasaran individu tetapi juga menilai dampak keseluruhan dari program terhadap masalah atau situasi yang ingin diatasi.

Dalam konteks ini, pencapaian tujuan menyeluruh dalam program RTH mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya berhasil dalam mencapai target-target spesifik, seperti penambahan luas area hijau atau peningkatan partisipasi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan utama yaitu perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, penekanan pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH, yang disebutkan oleh beberapa informan, menunjukkan bagaimana keberhasilan program ini dinilai dari seberapa efektif masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pemeliharaan taman, yang pada gilirannya menciptakan dampak positif yang lebih luas.

Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam implementasi program, seperti keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, serta tantangan dalam pengaturan pedagang kaki lima, mencerminkan kompleksitas dalam mencapai tujuan menyeluruh. Kendala-kendala ini harus

diatasi untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjang dari program RTH dapat tercapai dengan baik. Sesuai dengan teori Mutiarin, pengukuran efektivitas yang holistik harus mempertimbangkan bagaimana program ini mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, serta bagaimana kontribusi program dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dapat diukur secara komprehensif.

Dengan demikian, pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif dalam mengevaluasi efektivitas program RTH, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian target individu tetapi juga pada dampak keseluruhan program terhadap kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi yang demikian akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keberhasilan program dalam memenuhi tujuan jangka panjangnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dinilai efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, keberhasilan program terlihat dari pencapaian target utama seperti penambahan luas area hijau dan peningkatan partisipasi masyarakat. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan anggaran dan perubahan kebijakan, program ini berhasil mencapai sebagian besar sasaran yang ditetapkan. Kedua, keberhasilan sasaran individu juga tercapai dengan baik, seperti peningkatan jumlah taman dan luas area yang dikelola, meskipun terdapat kendala seperti pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pelaksanaan. Ketiga, kepuasan terhadap program cukup tinggi, sebagaimana tercermin dari partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH. Meskipun ada beberapa masalah terkait pengaturan pedagang kaki lima, umumnya masyarakat merasa program ini memberikan manfaat positif bagi lingkungan mereka. Keempat, dalam hal tingkat input dan output, program ini menunjukkan efisiensi yang memadai dengan memanfaatkan anggaran dan sumber daya secara optimal, meskipun ada kebutuhan untuk perbaikan dalam hal manajemen dan koordinasi untuk mengatasi kendala yang ada. Terakhir, pencapaian tujuan menyeluruh dari program ini juga dapat dikatakan efektif. Program RTH tidak hanya memenuhi sasaran individu tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi ini menggarisbawahi bahwa program pengelolaan RTH berhasil dalam mencapai tujuan jangka panjangnya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan lingkungan perkotaan.

Berdasarkan evaluasi program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), beberapa saran berikut dapat membantu meningkatkan efektivitas program di masa depan:

1. Perbaikan Manajemen Proyek dan Koordinasi: Untuk mengatasi kendala terkait keterbatasan anggaran dan koordinasi antar *stakeholder*, perlu adanya perbaikan dalam manajemen proyek. Pengelolaan yang lebih terstruktur dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terlibat, seperti pemerintah, masyarakat, dan konsultan, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program sangat penting. Kampanye sosialisasi, forum dialog terbuka, dan pelatihan dapat membantu masyarakat memahami peran mereka dalam pengelolaan RTH, serta mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama terhadap pemeliharaan taman.
3. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya: Evaluasi penggunaan anggaran dan sumber daya yang tersedia harus dilakukan secara berkala. Pengoptimalan sumber daya dan penyusunan anggaran yang lebih efisien akan membantu dalam mengatasi masalah terkait keterbatasan anggaran dan memastikan bahwa program dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
4. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Taman: Memastikan bahwa taman dan ruang terbuka hijau yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat adalah kunci keberhasilan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti lahan parkir dan fasilitas kebersihan harus dipertimbangkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

DAFTAR REFERENSI

- Batinggi, A. (1998). *Manajemen pelayanan umum*. Jakarta: STIA LAN.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (2008). *Public administration dictionary*. New York: John Wiley and Sons.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Danim, S. (2012). *Motivasi kepemimpinan dan efektifitas kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta Utama.
- Dimock, M. E., & Dimock, G. O. (1992). *Administrasi negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. (2022). *Taman Maju Bersama*. <https://www.jakarta.go.id/taman-maju-bersama>
- Gibson, J. L. (1990). *Organisasi dan manajemen: Perilaku dan proses*. Jakarta: Erlangga.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator dan implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Henry, M. (2008). *Democracy, decentralization, and development*. New York: Asia Publishing House.
- Ibrahim, A. (2008). *Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya*. Jakarta: Mandar Maju.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2022). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau*.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UI Press.
- Moenir, H. A. S. (2002). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). *Manajemen birokrasi dan kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nicholas, H. (1995). *Administrasi negara dan masalah-masalah publik*. Jakarta: Grafindo Utama.
- Nigro, F. A., & Nigro, L. G. (1970). *Modern public administration*. New York: Harper & Row.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan praktek pemerintah dan otonomi daerah*. Jakarta: Grasindo.
- O'Reilly, R. (2003). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Pasolong, H. (2007). *Kepemimpinan birokrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman*.
- Rahmayanty, N. (2010). *Manajemen pelayanan prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratminto, & Winarsi. (2005). *Manajemen pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian, S. P. (1996). *Organisasi dan perilaku administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, L. P. (2008). *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, M. R. (1985). *Efektivitas organisasi perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Sutrisno, E. (2010). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie, I. K. (1999). *Ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiie, I. K. (2012). *Ilmu administrasi publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tika, P. (2008). *Budaya organisasi dan peningkatan kinerja perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroadmidjojo, B. (1978). *Pengantar administrasi*. Jakarta: LP3ES.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Wojowisoto, S. (1980). *Manajemen pelayanan publik*. Jakarta: Gramedia.